



Proceeding Seminar Internasional

**Pengembangan Peran
Bahasa dan Sastra Indonesia
Untuk Mewujudkan Generasi Berkarakter**

Surakarta, 28-29 September 2013



PERTEMUAN ILMIAH BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (PIBSI) XXXV

POTENSI-POTENSI MENJADIKAN BAHASA INDONESIA BERMARTABAT

Yuliana Setyaningsih
Universitas Sanata Dharma
yulia@usd.ac.id

Abstract

One indicators of dignified language is that the language is widely used both by community owners and community outside the language. In connection with functions, a language can be said dignified if it serves many functions. Indonesian is the case. This national language will serve as dignified language if it has many functions and variety of interests. Language is related to society and culture and the relationship is like a piece of double-sided coin. Language is related to economy because the socio-economic progress of a nation can indeed be seen from the linguistic progress. Prosperous society usually have many languages. On the other hand, poor society tend not to have many languages. The language is also related closely to political situation of a nation. The progress and status of Indonesian language can be seen from the parameters of social, cultural, economic, and political situations. This fact is in line with the views of Bourdieu (1993:13) who says that there are three main capitals used to develop values in society including of course the language. How the representation and extent of the influential parameters to make dignified Indonesian language will be explained in detail in this short paper. In other words, this simple paper will discuss potentials exist around Indonesian language to make it grows into dignified language.

Keywords: *dignified language, political, cultural, economic, social*

A. Pendahuluan

Perjuangan menjadikan bahasa Indonesia bermartabat yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun hingga setakat ini, terasa sulit seakan-akan tidak segera dapat berakhir. Artinya, bahwa perjuangan pemartabatan bahasa ini seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Salah satu faktor penyebab belum berhasilnya upaya pemartabatan itu adalah adanya sikap tidak positif dari sebagian warga masyarakat pemakai bahasa Indonesia terhadap bahasa yang dimilikinya.

Hal ini bisa dilihat dari fakta banyaknya awafungsi bahasa dalam berbagai ranah dan bidang kehidupan. Sebagai contoh dalam ranah pendidikan sekarang ini merebak pemakaian bahasa Indonesia Inggris (*Indoglish*). Selain fenomena *Indoglish* dalam masyarakat kultur tertentu juga terjadi pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah sehingga memunculkan gejala seperti Jawanesia, Sundanesia, Maduranesia, dan lain-lain. (bdk. Rahardi, 2013).

Dalam ranah media, fakta awafungsi bahasa juga terbukti telah banyak dilakukan oleh banyakkantor redaksi media. Sebagai contoh, televisi swasta nasional tertentu bersikukuh untuk tetap memerantikan bentuk kebahasaan yang keliru 'terkini', bahkan kata itu digunakan sebagai judul acara tertentu.

Awafungsi bahasa demikian itu terjadi karena insan media itu sesungguhnya mengerti bahwa bentuk kebahasaan itu melanggar kaidah kebahasaan tetapi tetap saja digunakan dalam praktik kebahasaan. Awafungsi bahasa yang terjadi dalam berbagai ranah seperti sekilas ditunjukkan di atas dapat diatasi dengan menggali potensi-potensi pemartabatan bahasa Indonesia.

Makalah singkat ini berbicara ihwal potensi-potensi pemertabatan termaksud. Sebagai kerangka referensi digunakan pandangan Bourdieu karena pandangan ini relevan dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.

B. Potensi-potensi Pemertabatan Bahasa Indonesia dalam Kerangka Bourdieu

Dalam konteks pemertabatan bahasa Indonesia, pandangan Bourdieu (1993:15) yang menyebut adanya tiga modal utama, yaitu modal politik, budaya, dan ekonomi masih relevan untuk dikaji guna menggali potensi-potensi pemertabatan. Alasannya, bidang politik, budaya, dan ekonomi memang memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat dengan bidang bahasa. Artinya, keadaan politik, budaya, dan ekonomi suatu bangsa akan berkontribusi besar pada pengembangan bahasanya. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa pemertabatan bahasa itu tidak bisa dilepaskan dengan ketiga modal yang ditunjuk oleh Bourdieu. Dengan perkataan lain, modal politik, budaya, dan ekonomi merupakan potensi yang perlu digali dan dikaji bagi pemertabatan bahasa Indonesia. Dalam makalah ini sebutan modal yang disampaikan Bourdieu dianggap sama dengan sebutan potensi oleh penulis. Oleh karena itu, sebutan potensi akan digunakan pada bagian-bagian berikut.

Potensi Politik

Berkaitan dengan upaya pemertabatan bahasa Indonesia, kebijakan politik bahasa nasional tidak boleh berhenti pada penempatan status bahasa nasional dan bahasa negara tetapi juga fungsi-fungsi yang diemban oleh bahasa Indonesia dalam rangka status tersebut perlu dievaluasi dan dikaji dengan cermat dan mendalam. Sebagai contoh, bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi maka evaluasi dan kajiannya adalah sejauh mana bahasa Indonesia itu memerankan fungsinya sebagai alat komunikasi dalam percaturan global ini. Contoh yang lain, bahasa Indonesia dalam status sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pengembang ilmu dan kebudayaan, maka evaluasi dan kajiannya adalah sejauh mana bahasa itu memerankan fungsi pengembang ilmu dan kebudayaan tersebut.

Hal lain yang perlu disebutkan dalam kaitan dengan kebijakan politik bahasa nasional adalah pemakaian pedoman ejaan dan tata bahasa baku bahasa Indonesia yang sudah berjalan puluhan tahun, tetapi tidak secara optimal dievaluasi keberterimaannya. Sesungguhnya, di dalam pedoman dan buku tersebut masih terdapat aneka ketidakcermatan.

Selanjutnya jika dilihat kebijakan dalam bidang perkamusan, perkamusan Indonesia cukup bagus, dalam arti perkembangan jumlah lema dalam setiap edisinya. Akan tetapi, inkonsistensi kehadiran lema masih sering terjadi. Sebagai contoh, kata 'memperhatikan' yang muncul pada edisi terakhir, ternyata muncul sebagai 'memerhatikan' dalam edisi sebelumnya. Demikian juga lema 'China' dalam edisi kamus yang terbaru (KBBI, 2008), ternyata muncul sebagai 'Cina' dalam edisi yang sebelumnya.

Dalam bidang politik, yang bertali-temali dengan upaya pemertabatan bahasa Indonesia adalah masalah keteladanan berbahasa dari para politisi di forum-forum politik, para pejabat negara dalam forum-forum nasional, para akademisi dalam forum-forum ilmiah akademik, dan lain-lain. Masih banyak ditemukan bahwa dimensi keteladanan ini tidak muncul di kalangan mereka, padahal secara politis mereka memiliki peran yang besar.

Fakta lain yang juga sangat mendasar dalam konteks politik adalah implementasi yang tidak konsekuen terhadap pemberlakuan undang-undang bahasa yang telah disahkan beberapa tahun silam. Sesungguhnya, undang-undang bahasa itu bisa berdampak besar untuk mengatur pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik, tetapi ternyata undang-undang bahasa itu lemah

Makalah singkat ini berbicara ihwal potensi-potensi pemertabatan termaksud. Sebagai kerangka referensi digunakan pandangan Bourdieu karena pandangan ini relevan dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.

B. Potensi-potensi Pemertabatan Bahasa Indonesia dalam Kerangka Bourdieu

Dalam konteks pemertabatan bahasa Indonesia, pandangan Bourdieu (1993:15) yang menyebut adanya tiga modal utama, yaitu modal politik, budaya, dan ekonomi masih relevan untuk dikaji guna menggali potensi-potensi pemertabatan. Alasannya, bidang politik, budaya, dan ekonomi memang memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat dengan bidang bahasa. Artinya, keadaan politik, budaya, dan ekonomi suatu bangsa akan berkontribusi besar pada pengembangan bahasanya. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa pemertabatan bahasa itu tidak bisa dilepaskan dengan ketiga modal yang ditunjuk oleh Bourdieu. Dengan perkataan lain, modal politik, budaya, dan ekonomi merupakan potensi yang perlu digali dan dikaji bagi pemertabatan bahasa Indonesia. Dalam makalah ini sebutan modal yang disampaikan Bourdieu dianggap sama dengan sebutan potensi oleh penulis. Oleh karena itu, sebutan potensi akan digunakan pada bagian-bagian berikut.

Potensi Politik

Berkaitan dengan upaya pemertabatan bahasa Indonesia, kebijakan politik bahasa nasional tidak boleh berhenti pada penempatan status bahasa nasional dan bahasa negara tetapi juga fungsi-fungsi yang diemban oleh bahasa Indonesia dalam rangka status tersebut perlu dievaluasi dan dikaji dengan cermat dan mendalam. Sebagai contoh, bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi maka evaluasi dan kajiannya adalah sejauh mana bahasa Indonesia itu memerankan fungsinya sebagai alat komunikasi dalam percaturan global ini. Contoh yang lain, bahasa Indonesia dalam status sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pengembang ilmu dan kebudayaan, maka evaluasi dan kajiannya adalah sejauh mana bahasa itu memerankan fungsi pengembang ilmu dan kebudayaan tersebut.

Hal lain yang perlu disebutkan dalam kaitan dengan kebijakan politik bahasa nasional adalah pemakaian pedoman ejaan dan tata bahasa baku bahasa Indonesia yang sudah berjalan puluhan tahun, tetapi tidak secara optimal dievaluasi keberterimaannya. Sesungguhnya, di dalam pedoman dan buku tersebut masih terdapat aneka ketidakcermatan.

Selanjutnya jika dilihat kebijakan dalam bidang perkamusan, perkamusan Indonesia cukup bagus, dalam arti perkembangan jumlah lema dalam setiap edisinya. Akan tetapi, inkonsistensi kehadiran lema masih sering terjadi. Sebagai contoh, kata 'memperhatikan' yang muncul pada edisi terakhir, ternyata muncul sebagai 'memerhatikan' dalam edisi sebelumnya. Demikian juga lema 'China' dalam edisi kamus yang terbaru (KBBI, 2008), ternyata muncul sebagai 'Cina' dalam edisi yang sebelumnya.

Dalam bidang politik, yang bertali-temali dengan upaya pemertabatan bahasa Indonesia adalah masalah keteladanan berbahasa dari para politisi di forum-forum politik, para pejabat negara dalam forum-forum nasional, para akademisi dalam forum-forum ilmiah, akademik, dan lain-lain. Masih banyak ditemukan bahwa dimensi keteladanan ini tidak muncul di kalangan mereka, padahal secara politis mereka memiliki peran yang besar.

Fakta lain yang juga sangat mendasar dalam konteks politik adalah implementasi yang tidak konsekuen terhadap pemberlakuan undang-undang bahasa yang telah disahkan beberapa tahun silam. Sesungguhnya, undang-undang bahasa itu bisa berdampak besar untuk meningkatkan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik, tetapi ternyata undang-undang bahasa itu lemah

sekali dalam implementasinya. Dengan perkataan lain, undang-undang bahasa itu berpotensi besar untuk menjamin pemertabatan bahasa Indonesia ke depan.

Dari uraian itu dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya masyarakat bangsa Indonesia memiliki modal politik yang besar untuk menjadikan bahasa Indonesia lebih berwibawa dan bermartabat dalam kancah regional maupun internasional. Bahasa Indonesia yang berwibawa dan bermartabat dalam kancah yang luas itu akan menjadikan bahasa tersebut diterima dan diakui sebagai bahasa yang dapat mewartabahi banyak kepentingan.

Potensi Budaya

Dalam kaitan dengan upaya pemertabatan bahasa Indonesia, sesungguhnya baik budaya dalam pengertian kesenian sebagai produk budaya, maupun budaya dalam pengertian budidaya manusia, sama-sama memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan global dalam berbagai bidang kehidupan seperti yang terjadi sekarang ini, potensi budaya yang dimaksud dalam tulisan ini adalah budidaya manusia.

Budaya dalam pengertian budidaya manusia itu dapat mencakup banyak hal, misalnya budaya bermedia, budaya berpikir kritis, budaya berpikir ilmiah, dan budaya-budaya yang lainnya. Budaya-budaya itu muncul dalam kaitan dengan bonus demografi yang terjadi di era sekarang ini. Secara kultural kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir ilmiah, keterampilan metakognisi juga merupakan modal budaya masyarakat bangsa Indonesia untuk mengembangkan bahasa nasional dan bahasa negaranya. Sebagai contoh, sikap positif yang dimiliki oleh generasi muda dalam bermedia. Sikap itu terlihat misalnya saja dalam hal sering dimanfaatkannya terminologi-terminologi baru dalam konteks kosakata dalam bidang media. Terhadap terminologi-terminologi baru tersebut, orang harus bersikap adaptif dan harus senang untuk menggunakannya. Jadi, yang pertama-tama dikedepankan janganlah sikap resisten, sikap yang menolak terhadap perkembangan baru tersebut. Sebagai contoh di dalam harian *Kompas* pada akhir-akhir ini digunakan kata 'petahana' alih-alih bentuk '*incumbant*'. Demikian pula dalam harian ini digunakan bentuk 'akun semasa' untuk menyebut terminologi Inggris '*current account*'. Terhadap perkembangan terminologi baru tersebut kita diharapkan memiliki sikap positif untuk menggunakannya.

Potensi Ekonomi

Dalam kaitan dengan bidang ekonomi, potensi-potensi pemertabatan bahasa Indonesia dapat digali melalui kebijakan pemakaian kata asing di ruang publik. Globalisasi memberikan ruang gerak bidang ekonomi semakin terbuka. Kerja sama ekonomi antarnegara dalam bidang perdagangan semakin luas. Sebagai contoh, produk-produk dari negara lain (China, Jepang, Korea, Amerika) membanjiri pasar ekonomi di Indonesia. Berbagai produk dari berbagai negara lain dapat dijumpai di seluruh kota di Indonesia dalam skala besar. Merk-merk dagang dari luar negeri menguasai perekonomian di Indonesia. Dalam kaitan dengan ini, kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan istilah dan penamaan dengan kata asing dan menggantinya dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia seperti ini akan banyak mendukung upaya pemertabatan bahasa Indonesia.

Potensi lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah fenomena bergeliatnya industri-industri rumahan di berbagai pelosok negeri. Berkembangnya industri-industri rumahan yang banyak menghasilkan produk-produk khas daerah, seperti ini juga menjadi potensi besar bagi upaya pemertabatan bahasa-bahasa daerah yang dipayungi oleh bahasa Indonesia. Dalam kaitan dengan potensi ekonomi, dapat juga disebut berkembangnya industri

kuliner di berbagai sudut kota, yang memerintakan nama-nama yang khas kedaerahan seperti 'Bumbu Desa', 'Kangen Desa', 'Obong', 'Bebakaran', 'Racik Desa', dan lain-lain, semakin mempertegas fakta bahwa sesungguhnya dari dimensi ekonomi, potensi pemertabatan itu demikian besar.

Baik juga dicatat di sini, bahwa dalam konteks globalisasi, kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah fenomena 'glokalisasi' (*glocalization*). Dengan glokalisasi itu, globalisasi bukan pertama-tama ditandai oleh segala sesuatu yang sifatnya serba asing, serba luar negeri, tetapi sebaliknya potensi nasional, potensi daerah, memiliki tempat untuk diangkat ke dalam kancah regional dan internasional. Maka berkaitan dengan potensi-potensi ekonomi yang datang dari daerah, dalam kerangka globalisasi ini justru mendapatkan tempat tersendiri untuk dikembangkan agar dapat mendukung pemertabatan bahasa Indonesia.

Potensi Sosial

Potensi sosial tidak disebut dalam kerangka Bourdieu, tetapi penulis melihat bahwa potensi sosial juga berperan besar dalam upaya memertabatan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, potensi tersebut diuraikan pada bagian ini. Seperti telah disinggung di atas, bahwa sekarang ini hingga beberapa tahun ke depan, masyarakat bangsa Indonesia mendapatkan kelebihan jumlah generasi muda, atau yang sering disebut sebagai bonus demografi. Generasi muda yang tersedia dalam jumlah besar itu jelas sekali merupakan potensi sosial untuk mengembangkan masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dalam kaitan dengan pemertabatan bahasa, generasi muda yang tersedia dalam jumlah banyak itu dapat dijadikan wahana untuk menjadikan bahasa Indonesia berkembang penuh dinamika. Dengan perkataan lain, potensi sosial dalam wujud generasi muda yang jumlahnya besar itu akan dapat digunakan sebagai wahana menjadikan bahasa Indonesia berkembang bermartabat. Dalam kaitan dengan itu, sepertinya perlu disikapi secara benar kecenderungan sikap generasi muda yang tidak lagi positif terhadap bahasa Indonesia, tetapi suka menggunakan bentuk-bentuk yang keasing-asingan. Fenomena bahasa *Indoglish* yang berkembang di kalangan muda selama ini harus disikapi dengan lebih baik dan kritis sehingga mereka dapat dioptimalisasikan sebagai sosok-sosok penopang pemertabatan bahasa.

Dalam rangka penyadaran pada kaum muda tentang sikap dalam berbahasa itu, perlu dikemukakan di sini perlunya generasi mudaitu mengenal konteks. Amanat Sumpah Pemuda untuk 'menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia' (Rahardi, 2005) harus dimaknai sebagai 'mengerti konteks', atau yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai 'ngerti papan' alias 'empan papan'. Dengan mampunya generasi bangsa ini mengenali konteks pemakaian bahasa, tidak perlu lagi dikhawatirkan adanya pencampuran bahasa di kalangan mereka. Pemerantian bahasa ragam ilmiah, jangan sampai dikacaukan dengan pemakaian bahasa ragam non-ilmiah karena masing-masing memiliki parameter dan standarnya sendiri-sendiri. Jadi, sesungguhnya itulah yang menjadi amanat dalam Sumpah Pemuda, yakni bahwa semua bahasa boleh ada, semua ragam bahasa boleh ada, tetapi satu bahasa yang harus dijunjung tinggi, yakni bahasa Indonesia.

C. Penutup

Sebagai penutup dapat ditegaskan bahwa bahasa Indonesia yang telah distandardisasi untuk dijadikan bahasa yang bermartabat harus dijaga dan dikembangkan terus upaya-upaya pemertabatannya. Pemertabatan bahasa dapat dioptimalisasikan upaya-upayanya dengan cara

menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Masyarakat bangsa Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadikan bahasa Indonesia lebih bermartabat di masa mendatang. Potensi-potensi perkembangan itu sejalan dengan pemikiran Bourdieu, yang menegaskan bahwa dalam masyarakat terdapat tiga dimensi yang sangat berpengaruh, yakni politik, budaya, dan ekonomi. Namun demikian, dimensisosial juga merupakan salah satu dimensi yang berpengaruh besar dalam upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Dimensi sosial dan budaya jelas sekali merupakan matra yang tidak dapat terpisahkan dengan bahasa. Ibaratnya keduanya merupakan satu keping uang logam bersisi dua, yang mustahil untuk dipisahkan.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre. (1991). *The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literature*. Florida: Columbia University Press.
- Depdiknas. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Rahardi, Kunjana. (2013). *Fenomena Indoglish dan Jawanesia dalam Ranah Pendidikan*. Yogyakarta: Laporan Penelitian LPPM, USD.
- _____. (2005). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Erlangga.